



Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

Dina Fadiyah¹, Rahmi Kania Dewi²; Ayi Karyana¹

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta, 15418, Jakarta-Indonesia

² Jurusan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mai 05, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Dinasti Politik; Demokrasi; Pemilu;

Koresponden:

Dina Fadiyah

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka Jakarta

Email:

dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id

Sitasi Cantuman:

Fadiyah, D., Dewi, R. K., & Karyana, A. (2022). Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan. *Journal of Political Issues*, 4(1); 19-28. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study discusses the power of Aang Hamid Suganda's Political Dynasty in Kuningan Regency. This research is based on political dynasties that still exist in the era of democracy, even though democracy itself states that political dynasties are a bad system and are contrary to democracy. The purpose of this study is to understand how the formation of dynastic politics carried out by the family of Mr. Aang Hamid Suganda to his son. This research is motivated by his political journey which is so influential on the successor to the leadership taken over by his wife and children, making the success of his tenure as Regent of Kuningan calculated from 2003 to 2013. This study uses qualitative research methods, with a descriptive approach and literacy studies as well as interview results. The theoretical basis used in this research is the theory of democracy and political dynasties. The results of this study indicate that Aang Hamid Suganda has built political influence during his leadership, and earned the nickname "Aang Hotmix". This father of development in Kuningan has succeeded in creating a good image in Kuningan Regency, so that when his term of office ended and was replaced by his wife and then his son. The conclusion is that the political dynasty that occurred in Kuningan was the result of the previous leadership who succeeded in building a good image so that it had an impact on its successors.

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini didasari oleh dinasti politik yang masih eksis di era demokrasi, padahal demokrasi sendiri menyebutkan bahwa dinasti politik itu sistem yang buruk dan bertolakbelakang dengan demokrasi. Tujuan penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana terbentuknya politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Aang Hamid Suganda hingga anaknya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjalanan politiknya yang begitu berpengaruh terhadap penerus kepemimpinan yang diambil alih oleh istri dan anaknya menjadikan kesuksesan dari masa jabatannya menjadi Bupati Kuningan dihitung dari tahun 2003 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan studi literasi serta hasil wawancara. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan dinasti politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aang Hamid Suganda telah membangun pengaruh politik pada masa kepemimpinannya, dan mendapat julukan "Aang Hotmix". Bapak pembangunan di Kuningan ini telah sukses menciptakan citra baik di Kabupaten Kuningan, sehingga pada saat ia habis masa jabatannya dan digantikan oleh istri kemudian anaknya. Kesimpulannya adalah dinasti politik yang terjadi di Kuningan adalah hasil dari kepemimpinan sebelumnya yang berhasil membangun citra baik sehingga berdampak kepada penerusnya.

Tentang:

Dina Fadiyah menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.

Rahmi Kania Dewi menyelesaikan Studi Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2020.

Ayi Karyana menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.

PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin membahas tentang dinasti politik, yang mana sering sekali diartikan dengan politik keluarga atau politik kekerabatan merupakan praktik politik yang kerap digunakan oleh pemerintahan lokal untuk memperkuat kekuasaannya. Padahal dinasti politik ini masih menunjukkan adanya feodalisme dan tradisi monarki yang mana berarti kekuasaan akan diatur oleh segelintir orang atau hanya para kaum elit saja dan ini menunjukan bahwa jauh dari demokrasi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi harusnya menghadang praktik dinasti politik yang terjadi di Indonesia apalagi daerah, karena bisa saja praktik dinasti politik ini digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang akan merugikan bangsa ini (Wasisto, 2013).

Dalam kasus Pemilukada di Indonesia melakukan kedua jenis pembentukan dinasti politik di setiap Daerah/Kotanya. Ada yang melakukan dalam jenis by design dengan penggantian kekuasaan oleh istri atau anaknya, dan by accident mencalonkan kerabatnya agar dapat menggantikannya untuk menjadi pemeimpin selanjutnya dengan tujuan mengekalkan kekuasaan di daerah/kota tersebut. (Wasisto, 2013). Seperti yang terjadi di Banten dengan dinasti politik Ratu Atut Chosiyah dengan sejumlah kerabatnya. Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten periode 2007-2012 misalnya, keluarganya setidaknya memiliki kekuasaan sebagai petinggi di Banten.

Sebetulnya masih banyak lagi kasus serupa mengenai dinasti politik yang ada di Indonesia, akan tetapi penulis akan memfokuskan satu kasus yang akan ditelitinya yaitu Dinasti Politik Aang Hamid Suganda sebagai mantan Bupati Kuningan Periode 2003-2013 yang mana saat masa jabatannya habis istri serta anaknya menggantikannya di bangku pemerintahan Kabupaten Kuningan. Aang Hamid Suganda ini adalah Bupati Kuningan yang mulai menjabat tahun 2003 dan berhasil memenangkan lagi pada pemilihan bupati tahun 2008, maka dari itu ia mendapatkan kesempatan menjadi bupati salam 2 periode.

Selanjutnya, setelah Aang Hamid Suganda ini lengser dari jabatannya ia tidak segan membeberkan mengajukan istrinya untuk maju di pilbup, dengan perolehan suara mencapai 44,99 persen dan mengungguli raihan suara maka istri dari mantan Bupati Kuningan ini berhasil menggantikannya dan menduduki bangku bupati. Utje Ch Hamid Suganda nama yang dikenal sebagai pengganti Bupati sebelumnya yang akan menjabat dari tahun 2013-2018 (Tribunnews.com, 2013).

Akan tetapi pada tahun 2016 ibu Utje Ch Hamid Suganda meninggal dunia dan pada akhirnya masa jabatannya digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Acep Purnama. Setelah masa jabatannya habis Bapak Acep Purnama ini mencalonkan diri kembali dengan menggandeng anak terakhir dari mantan bupati Kuningan yaitu M. Ridho Suganda, wajah baru di Kuningan ini ternyata menarik banyak perhatian karena dirinya adalah generasi muda yang muncul untuk membangun Kota Kuningan. Ridho ini juga dikenal karena merupakan anak terakhir dari Bapak Aang yang sebelumnya adalah Bupati Kuningan, akan tetapi ternyata dirinya memiliki karakteristik tersendiri untuk mengambil hati masyarakat Kuningan yaitu dengan gencar bersosialisasi di media sosial dan lebih mendekatkan dirinya terhadap para generasi muda (Pikiranrakyat.com, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui wawancara dengan informan peneliti yang sudah ditetapkan. Sumber data yang digunakan ada dua metode yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2016). Sumber data primer yang digunakan berupa

Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, Ayi Karyaana:

Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

wawancara dan pengambilan data sekunder dapat menggunakan dua cara, yaitu secara manual (studi pustaka, buku-buku, koran, majalah, dll) dan secara online (website, berita online, dll). Informan penelitian ini terdiri dari Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua 1 Partai Golkar, Wakil Ketua 1 Partai Demokrat dan Kerabat dekat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aang Hamid Suganda

Aang Hamid Suganda adalah Bupati Kuningan Periode 2003-2013 dia menjabat menjadi Bupati sebanyak dua periode yaitu periode pertama pada tahun 2003-2008 dan periode kedua pada tahun 2008-2013. Dengan gaya kepemimpinan yang khas serta merakyat dan visioner semangat membangun pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Gaya seperti itu memang sangat diperlukan untuk mengubah pelayanan pemerintahan yang seharusnya masyarakat terima. Meskipun tanpa publikasi yang gencar tetapi rakyat sangat merasakan perubahan yang besar (Ilmu Pengetahuan Dunia).

Dengan kinerja yang bagus yaitu dalam bidang perekonomian, pertanian, pariwisata dan pendidikan. Maka Bapak Aang ini telah memiliki kepercayaan dari rakyat dan menjadikannya kandidat unggul lalu memenangkan lagi Pemilihan Bupati tahun 2008-2013. Karena kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat pada masa jabatannya, pak Aang ini berhasil memecahkan rekor yang bersejarah, karena selama Kabupaten Kuningan berdiri baru pak Aang saja yang menjabat 2 periode dalam memimpin.

“Sistem politik pada saat itu berubah, pak Aang pertama dan kedua itu berbeda. Karena yang pertama itu kan dia dipilih oleh dewan, dan yang kedua itu dipilih oleh masyarakat. Dan pada saat itu juga kan terjadinya perubahan sistem politik di daerah yang disebut otonomi daerah, selanjutnya karena pak Aang ini orang yang bisa membangun dan masyarakat juga bisa merasakan perubahan itu diiringi dengan sistem politik yang berubah ke pemilihan secara langsung pada saat tahun 2008. Kebetulan juga pak Aang pada saat itu ia dari partai Golkar diajak berkoalisi dengan kami partai Golkar dengan mengusungkan pak Momon Rochman untuk menjadi wakilnya. Ya beliau bisa dua kali ya karena dipilih dengan sistem politik yang berbeda, pertama dipilih oleh dprd dan yang kedua dipilih oleh rakyat. Karena pembangunan pak Aang ini sudah terasa dengan pendelegasian keuangan dari pusat ke daerah dengan otonomi daerah dampaknya terlihat dimana-mana maka masyarakat percaya untuk dia menjabat 2 periode.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)

Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda diantara para manajer, yaitu: perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), perilaku yang berorientasi pada hubungan (relationship oriented behavior), dan kepemimpinan partisipatif ([Ratnamiasih & Warenih, 2014](#)).

Utje Ch Hamid Suganda

Utje Ch Hamid Suganda ini adalah istri dari Bapak Aang yang maju pada Pemilihan Bupati tahun 2013, Pada pemilihan Bupati saat itu Ibu Utje sangat optimis dalam kemenangan pemilu karena ia memiliki visi misi yang berkaitan dan akan membangun masyarakat kecil di Kuningan. Dan ia pun menolak keras adanya Dinasti Politik karena ia adalah istri dari mantan Bupati Kuningan, menurutnya ia mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kuningan karena ada dukungan dari masyarakat bawah untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Aang Hamid Suganda ([Tempo.co, 2013](#)).

“Memang Pak Aang juga sempat mendorong Ibu Utje untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati, dengan tujuan menyelesaikan pembangunan Pak Aang yang belum selesai”
(Hasil wawancara dengan Bapak Maman Kirman kerabat dekat Bapak Aang pada Agustus 2021)

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 3 Hj Utje Ch Hamid Suganda-H Acep Purnama (Utama), ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Kuningan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) Kuningan dengan perolehan suara sebanyak 240.528. Namun, saksi dari tiga pasangan calon lainnya, menyatakan keberatan serta menolak terpilihnya pasangan Utama yang diusung PDIP, PBB, PKPI, PDK, PKPB, PAN, dan PPP tersebut. Melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilbup Kuningan yang digelar KPU Kab. Kuningan, pasangan Utama mengungguli perolehan suara saingan terdekatnya, yakni pasangan nomor urut 1 H Momon Rochmana-HT Mamat Robby Suganda (Rochmat) dengan selisih 40.875 suara. Perseteruan ini berlanjut hingga menemukan isu bahwa pasangan calon nomor urut 3 ini melakukan kecurangan yaitu politik uang. Sidang pemeriksaan pendahuluan PPHU Kabupaten Kuningan – Perkara No. 136/PHPU. D-X/2013 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/10) siang. Pemohon adalah Pasangan Calon No. Urut 1 Momon Rochmana dan Mamat Robby Suganda, mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kuningan (Termohon) tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Menurut Pemohon, proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuningan 2013 berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan dan Pasangan Calon No. Urut 3 Utje CH Hamid Suganda dan Acep Purna (Pihak Terkait).

Akan tetapi pada saat sidang pleno ketika rekapitulasi hasil suara, tidak ditemukannya data politik uang tersebut. Sehingga tim lawan memberikan protes dan tidak terima atas keputusan KPU kabupaten Kuningan (Administrator, 2018).

“Pendapat saya, saya juga tidak bisa membenarkan karena isu-isu tersebut harus betul-betul diteliti dan dipahami dan dikaji. Terlepas dari politik uang dan pemanfaatan fasilitas APBD dan memanfaatkan PNS, ini menjadi dilema karena sistem politik kita yang menganut sistem politik pemilihan langsung itu banyak konsekuensinya salah satunya yaitu seperti itu dan sampai saat ini itu terjadi disetiap rezim manapun, karena wajarlah lah beliau kan istri Bupati yang melekat jika Bupati sedang kemana itu bisa jadi sangkaan bahwa bu Utje ini sedang melakukan kampanye, padahal ia hanya menemani suaminya saja. Kalo disebut memanfaatkan itu kan tidak boleh, karena PNS harus netral dan APBD harus digunakan untuk masyarakat, tetapi pada saat beliau melakukan kegiatan dan masyarakat berfikir itu bagus, ya itulah kelebihan incumbent dibandingkan calon yang lain. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa itu salah, karena bagaimanapun ia adalah penggerak ibu-ibu PKK yang didorong oleh dinas dan suaminya maka menurut saya sah-sah saja.

Dan terkait money politik, selama pengawasannya tidak paripurna dan masyarakatnya belum melek tentang bahayanya money politik. Money politik itu akan dilakukan oleh siapa saja, karena itu termasuk instrument untuk memenangkan “kecurangan”, karena didunia demokrasi ini sulit untuk tidak melakukan money politik. Karena apa? Karena ada istilah money politik dan cosh politik, biasanya orang menilai jika tim dikasih ongkos jalan itu dibilang money politik, padahal tidak sebenarnya kan itu hanya pemikiran masyarakat yang masih baru terhadap sistem politik pemilihan langsung, karena Kuningan kan baru 3 kali melakukan pemilihan secara langsung ya masih jauh untuk bisa ideal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)

Dengan banyaknya konflik dan polemik yang terjadi pada saat pemilihan Bupati kuningan, tetap saja perolehan suara yang sengit antara pasangan calon 1 Momon dan Rahmat dengan pasangan calon 3 Utje dan Acep akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon 3. Akan tetapi takdir berkata lain pada masa jabatannya di tahun 2016, ibu Utje Ch Suganda menutup usia karena penyakit. Dan mengharuskan wakilnya yaitu Bapak Acep Purnama menggantikan posisi menjadi Bupati Kuningan.

Mochamad Ridho Suganda

Mochammad Ridho Suganda adalah anak terakhir dari pasangan Aang Hamid Suganda dengan Utje Ch Suganda, sejak ia mencalonkan diri menjadi wakil Bupati periode 2018-2023 ia mulai gencar menjadi perbincangan public. Karena sebelumnya ia tidaklah dikenal oleh masyarakat Kuningan dan hanya sebatas tahu bahwa Ridho ini adalah anak dari mantan Bupati Kuningan.

Ridho ini adalah seorang aktivis di kota kelahirannya yaitu Bogor, dimana ia adalah seorang ketua DPD Komite Pemuda Nasional (KNPI) kota Bogor. Selain itu ia juga menjadi ketua Karang Taruna Kota Bogor periode 2016-2021. Meskipun Ridho ini lebih aktif di Bogor, tetapi ia juga cukup aktif di Kuningan dalam bidang olahraga dan juga meskipun tidak terjun langsung melihat bagaimana kondisi Kuningan ia sering diajak oleh kedua orang tuanya dan mempelajari Kuningan (Pikiranrakyat.com, 2018).

Selain dari bidang olah raga pada saat peneliti mengajak Pak Ridho ini berbincang ia juga mengatakan bahwa:

“Flashback beberapa waktu ke belakang dalam fase perkembangan diri sampai saya diberikan peluang oleh masyarakat Kuningan dalam generasi muda yang memimpin. Karena anak muda memimpin di pemerintahan ini bisa dihitung pakai jari, kesempatannya juga hanya sedikit yang diberikan kepada para pemuda. Generasi muda kini hanya dijadikan alat untuk berpolitik.

Kalo ada politisi yang ingin calon-calon dari generasi muda dan ingin merangkul generasi muda, tanpa melibatkan pemuda itu percuma. Karena bagaimana pun generasi muda bisa diandalkan dan jangan dilihat dari usia untuk melakukan aktifitas perpolitikan, siapa tau generasi muda memang punya strategi dan kemampuan yang lebih bisa membuat daerah maju dan sebagainya.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda wakil Bupati Kuningan pada Februari 2021)

Adapula strategi Pak Ridho dalam kampanye pada saat Pilkada 2018 lalu. Pembahasan mengenai strategi politik yang dilakukan oleh keluarga Aang Hamid Suganda hingga anaknya Moch. Ridho Suganda dilihat dari perjalanan politiknya memang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu apa itu strategi? Strategi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam manajemen politik guna untuk memenangkan pemilu atau pilkada, strategi dapat berupa rencana yang dibuat oleh seorang atau kelompok yang dilakukan melalui tindakan untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah disusun ([Putri & Indah, 2017](#)).

“Iya dari proses saya menjadi wakil Bupati pasti semuanya berproses, tidak mungkin tiba-tiba saya terpilih menjadi wakil Bupati seperti sekarang. Prosesnya pertama saya sebelum ke kabupaten Kuningan sangat aktif di organisasi kepemudaan. Saya menjadi ketua KNPI di Kota Bogor, saya menjadi ketua Karang Taruna di Kota Bogor dan sekarang menjabat sebagai Koordinator wilayah tiga di Provinsi Jawa Barat, saya juga aktif di partai dan saya juga adalah pengusaha dan juga saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebelum saya datang ke Kabupaten Kuningan.

Dan pada prinsipnya saya datang ke Kuningan ingin meneruskan perjalanan yang telah dilakukan oleh pendahulu dan saya ingin meneruskan perjalanan pembangunan yang telah dilakukan dan mengabdikan ke masyarakat.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)

Penuturan diatas adalah bagaimana awal perjalanan Bapak Ridho sendiri, hingga pada saat itu ia memiliki semangat dan visi untuk membangun Kabupaten Kuningan. Tidak bisa dipungkiri keaktifannya dalam partai membuat dirinya mendapatkan kepercayaan dari partai untuk lanjut ke tahap seleksi untuk menentukan apakah ia layak atau tidak untuk mencalonkan diri di Pemilu Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.

“Lalu saya juga melakukan seleksi dalam pemilihan Bupati, setelah selesai akhirnya saya memenangkan kedudukan dan dipasangkan dengan Bapak Acep. Lalu saya dengan beliau melakukan sosialisasi terhadap masyarakat selama 4 bulan dan Alhamdulillah masyarakat Kuningan memberi kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Kuningan dari 2018 hingga 2023 nanti.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)

Memang keunggulan yang dimiliki Bapak Ridho ini bisa membuatnya menjadi layak untuk maju dalam Pemilu Bupati tahun 2018. Apalagi ia adalah pasangan calonnya pak Acep

yang mana tingkat ketertarikan dari masyarakat itu masih tinggi, dan dianggap beliau membawa perubahan dari segi ekonomi. Karena jiwa mudanya dan semangat untuk membangunnnya ini yang menjadi ciri khas dari seorang Bapak Ridho, selain itu keaktifannya dalam kepemudaan ia bawa sebagai strategi politik pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Selain melalui bidang olahraga ia juga sering mengajak generasi muda untuk terus berkembang melalui media sosialnya.

“Strategi yang saya lakukan untuk mengambil kepercayaan masyarakat, yaitu saya menjadikan generasi muda sebagai patokan untuk saya kembangkan. Dengan menjadikan generasi muda lebih kreatif dan inovatif agar generasi muda bisa berkembang di daerahnya sendiri tidak melulu merantau.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kuningan pada Februari 2021)

Selanjutnya, mengenai majunya Bapak Ridho pada Pemilihan Bupati pada saat itu ada beberapa faktor lainnya yang membuat ia masuk kedalam kandidat Bakal Calon Pemimpin antara lain adalah partai PDI-P dan pihak mereka mengatakan bahwa memang mereka mengusung Bapak Ridho ini masih ada kaitannya bahwa beliau adalah anak dari mantan Bupati yaitu Bapak Aang dan Ibu Utje. Terlebih dari keunggulan yang Bapak Ridho miliki yaitu jiwa muda dan semangat tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, partai mengakui bahwa Pak Ridho ini memang cocok untuk dijadikan calon dalam pemilihan umum Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.

“Persoalan dari diusungnya Pak Ridho dilihat dari anak Pak Aang dan Bu Utje iya. Tapi saya menolak jika disebutkan itu dinasti politik. Karena kemampuan orang itu bukan dari keturunan, meskipun memang disatu sisi jika satu rumpun keluarga berkuasa didaerah itu adalah dinasti politik. Tapi dalam hal Pak Ridho ini partai mengusungkan beliau sebagai wakil bupati dengan pasangan Pak Aceh, karena Pak Ridho ini adalah generasi muda yang mempunyai semangat yang tinggi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rachdy Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PDI-P pada Agustus 2021)

Dalam tulisannya Ikrar Nusa Bakti mengemukakan analisisnya tentang faktor-faktor penyebab munculnya fenomena adanya keluarga bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah. Pertama, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat, seperti dalam kasus di Kabupaten Kuningan, namun bupati tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila keluarga mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang keluarganya sebagai “sang penuntun” (Susanti, 2017).

Tetapi dalam konteks dinasti politik Aang Hamid Suganda hingga anaknya, menurut penuturan warga itu tidak berdampak negative terhadap pelayanan masyarakatnya. Tapi jika dilihat dari kekuasaannya mereka menempatkan orang yang pro terhadap mereka ditempat yang enak, seperti di pemda hingga di DPRD. Setelah dicari tahu lebih lanjut ternyata memang keluarga ini sudah memiliki jejaring kekerabatan dari kekuasaan atasnya yaitu di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari artikel ini menyebutkan bahwa Klan Effendi dimulai oleh Yusuf Effendi yang menikahi Djuhriah. Pasangan itu dikaruniai beberapa anak yang di antaranya menguasai politik Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kuningan sejak tahun 1998. Anak-anaknya itu antara lain Rahayu Effendi, Agus Utara Effendi, dan Utje Choeriah Hamid Effendi.

Rahayu Effendi adalah artis senior yang menikahi Tammy Effendi, anak dari Roestam Effendi-sastrawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pasangan ini dikaruniai anak bernama Dede Yusuf Macan Effendi. Dede Yusuf menjabat wakil gubernur Jawa Barat 2008-2013. Agus Utara Effendi adalah Bupati Bogor selama dua periode dari 1998-2008. Ia

menikahi Sri Indratini. Pasangan ini dikaruniai anak bernama Fitri Putra Nugraha. Nungki, panggilan akrab Fitri, adalah calon bupati Kabupaten Bogor pada Pilkada 2018 ini.

Sementara Utje Choeriah Effendi (mengganti nama menjadi Utje Choeriah Hamid Suganda) membangun dinasti di Kabupaten Kuningan. Utje adalah Bupati Kuningan dari 2013 hingga kematiannya pada 2016. Sebelum Utje, Bupati Kuningan dijabat oleh suaminya Aang Hamid Suganda. Aang menjabat Bupati selama dua periode dari 2003-2013. Pasangan Utje dan Aang mempunyai anak bernama Moch. Ridho Suganda calon wakil bupati kabupaten Kuningan pada Pilkada 2018.

Anaknya yang lain, Erik Irawan Suganda, juga aktif di perpolitikan Bogor. Erik menjadi calon walikota Bogor 2008-2013. Ia juga masuk dalam bursa bakal calon walikota Bogor di PDIP pada Pilkada 2018. Pendek kata, calon di Pilkada Bogor (Nungki), Kuningan (Ridho), serta wakil gubernur Jawa Barat 2008-2013 (Dede Yusuf) mempunyai hubungan darah sepupu (Rumahpemilu.org, 2018).

“Menurut saya jika niat dan tujuannya baik tidak masalah ya meskipun itu dinasti politik. Karena menurut saya ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak adanya niat pemberhentian regenerasi politik.

Yang penting kita berpolitik itu niatnya apa, jika memang niatnya untuk kepentingan pribadi itu kan memang kesalahan besar ya. tetapi dari awal sampai saat ini visi misi, perjalanan, pembangunannya juga baik. Meskipun tidak 100% tercapai tetapi ada wujud nyata.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)

Berkaca dari tulisan diatas bagaimana pun ini sudah menyalahi demokrasi yang ada di Indonesia, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebageian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti ([Haris, 2015](#)). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner, bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik ([Susanti, 2017](#)).

Partai Menjadi Media Dinasti Politik

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan warna demokrasi di suatu negara, seperti yang dikatakan schattscheider, *“political parties created democracy”*. Arti penting partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin diwujudkan dengan perantara partai politik. Akan tetapi dibalik itu semua partai politik yang seharusnya dapat memainkan peran penting bagi kaderisasi pemimpin. Karena salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat desa, bupati dan wali kota, gubernur, hingga presiden. Kepemimpinan bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas dalam membangun negeri, bukan mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan, karena pemimpinlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil. Bahkan dalam pemahaman umum, faktor kepemimpinan juga merupakan faktor penentu utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu negara. Setiap partai politik tidak dapat mengusung calon kepala daerah dari kader partainya masing-masing sehingga partai politik harus melakukan koalisi dengan harapan

dapat memenangkan pasangan calon yang diusung. Dengan pertimbangan kesamaan landasan, visi-misi, platform, dan program kerja, supaya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan pemenangan pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Dengan begitu harus adanya reformasi internal dalam tubuh partai politik agar tidak memberikan celah apapun bagi masuknya perilaku pragmatis berkaitan dengan fungsi kader sebagai calon kepala daerah, dengan upaya menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggungjawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program, etika dan data. Guna terjaminnya pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi.

Namun, setelah berjalannya Pilkada di Indonesia tetap saja pemerintahan aras lokal masih banyak dikuasai oleh segelintir elit politik dan membuat tujuan pemerintahan ideal sulit untuk tercapai. Karena pertama, partisipasi masyarakat masih terkalahkan oleh elit politik. Hal ini dapat diperhatikan dari fakta-fakta bahwa calon ini adalah pilihan partai politik. Seperti halnya Pilkada Bupati di Kuningan pada tahun 2018, partai politik mengusung anak dari mantan Bupati untuk menjadi Wakil Bupati.

“Pilkada itu kan merupakan dwi tunggal, jadi tidak bisa masing-masing. Nah di usungnya Pak Acep Purnama dan Pak Ridho ini adalah hasil penjarangan dan penyaringan atau Bahasa lainnya adalah seleksi dari partai. Dari sekian banyak calon muncullah nama Pak Ridho. Pertama kenapa partai memilih Pak Acep, karena ia adalah seorang yang incumbent, kemudian dipasangkan dengan Pak Ridho. Kenapa partai memilih Pak Ridho, karena Pak Ridho ini adalah generasi muda, generasi millennial. Karena kita ingin mengkolaborasikan kader yang senior dengan yang junior.

Sekali lagi kenapa partai memilih Pak Ridho sebagai pasangan pak acep, ya karena dia adalah generasi muda, punya jiwa muda dan punya visi baik untuk kedepannya. Lagipula ia adalah anak dari mantan Bupati kita yaitu Bapak Aang dan Ibu Utje”.

(Hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rachdy ketua DPRD Kabupaten Kuningan pada Agustus 2021)

Meskipun menurut Bapak Nuzul ini dipilihnya atau diusungnya Bapak Ridho dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati itu atas keputusan partai, dengan menyisipkan kata-kata karena beliau adalah anak dari mantan Bupati, menjadikan kesan yang mencerminkan bahwa kekuasaan Bapak Aang di Kuningan ini sangat berpengaruh. Apalagi tahu bahwa Bapak Ridho ini adalah orang baru yang belum mengerti perpolitikan di Kuningan, harusnya partai lebih kompeten dalam perekrutan, karena bagaimanapun jika seorang pemimpin belum tahu seluk beluknya suatu daerah itu akan membuat banyak konflik, contohnya saja seperti perbedaan pendapat.

“Sebenarnya apapun partainya pasti mementingkan kemampuan yang lebih matang untuk diusungkan. Dalam bahasan ini memang ada kecenderungan partai dalam mengusungkan calon, karena memang pada masa jabatannya pak Aang inikan bisa dibilang berhasil maka dari itu partai juga ikut berdampak.”

(Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)

Tampaknya potensial dapat membahayakan penyelenggaraan governance pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu. Pertama, karena sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme checks and balances untuk dapat berjalan. Fakta empiris menunjukkan bahwa dinasti politik hanya mengutamakan kekerabatan, dan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya. Kedua, dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka playing field juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan. Ketiga, menguatnya politik kekerabatan merupakan

Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, Ayi Karyaana:

Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Keempat, di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis, maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi-posisi politik di daerah karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Partai politik tampaknya lebih mementingkan kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga ketidakwajaran maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh partai politik-partai politik besar demi terjaminnya kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, politik kekerabatan juga akan mempengaruhi pola rekrutmen partai politik di Indonesia yang lebih mengutamakan kandidat politik yang memiliki sumber daya ekonomi. Tidak hanya sebatas karismatik semata, tetapi kemampuan keuangan menjadi pertimbangan utama para partai politik. Sehingga praktik ini akan membuat seorang kandidat politik harus mampu memberikan sumbangan pendanaan kepada partai agar bisa direkrut menjadi figur dalam setiap kontestasi. Indikasi inilah bisa melahirkan fenomena mahar politik yang mana kandidat politik dalam proses rekrutmen tidak lagi berdasarkan rekam jejak tetapi berdasarkan besaran sumbangan mahar politik. Bahkan, kader partai yang menghidupkan partai melalui politik gagasan dengan rekam jejak yang baik, dinilai bukan pemilik partai. Lebih ironisnya para kader partai yang selalu mengedepankan politik gagasan dinilai sebagai kader pelengkap tanpa bisa mempengaruhi dalam proses kandidasi. Bahkan, para kader partai ini tidak memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki partai politik secara bersama-sama. Akibatnya, praktik mahar politik seringkali membuat kader organik secara tidak langsung akan tersingkir (Sudaryana, 2017).

SIMPULAN

Dinasti politik di Indonesia sudah berjalan pada saat kemerdekaan dan sudah menjadi buah bibir dikhalayak banyak orang karena melenceng dari demokrasi yang seharusnya menjadi landasan perpolitikan di Indonesia. Namun bagaimana pun dinasti politik itu selalu dianggap sebagai system politik yang buruk, karena didalam pemerintahan dan yang menduduki bangku kekuasaan hanya segelintir elit yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Ini menjadikan suatu peluang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin itu sangat kecil dan bisa disebut tidak adanya regenerasi baru untuk kepemimpinan suatu negara ataupun daerah. Selanjutnya, dinasti politik ini bisa saja dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, daerah dan negara sekaligus. Karena memberikan banyak peluang bagi para pemimpin yang memang gila akan kekuasaan dan kekayaan, selain akan menimbulkan otoriter dalam pemerintah juga kerap kali timbul masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pembahasan ini ditemukan memang adanya politik kekerabatan atau politik kekeluargaan yang dilakukan oleh Keluarga Suganda di Kabupaten Kuningan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya dampak negative atau pelanggaran Undang-Undang. Dalam penelitian ini juga menemukan hasil bahwa politik kekeluargaan di Kabupaten Kuningan sengaja dibentuk oleh partainya, karena hasil yang peneliti dapat dari wawancara Bapak Aang berhasil membuat rating partai baik dan ini juga dimanfaatkan oleh partai dan menjadikan Kabupaten Kuningan berbasis partai PDI-P.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2018). Pleno KPU Menetapkan Suara Terbanyak Diperoleh Pasangan Utama. Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01158031/pleno-kpu-menetapkan-suara-terbanyak-diperoleh-pasangan-utama>
- Ratnamiasih, I., & Warenih, W. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional pada Kinerja Pegawai Bappeda Kota Bandung. *TRIKONOMIKA*, 13(2), 119. <https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i2.607>
- Pikiranrakyat.com. 2018. "M.Ridho Suganda Siap Teruskan Jejak Kedua Orangtuanya". 6 Februari. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01293102/m-ridho-suganda-siap-teruskan-jejak-kedua-orangtuanya-418961>
- Putri, A., & Indah. (2017). *Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatra Barat Dalam Pemilu*. Moral and Civic Education.
- Rumahpemilu.org. 2018. "Sengkarut Politik Keekerabatan pada Pilkada 2018 di daerah Jawa Barat". 13 Maret. <https://rumahpemilu.org/sengkarut-politik-keekerabatan-pada-pilkada-2018-di-daerah-jawa-barat/>
- Sudaryana, B. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Tempo.co. (2013). Momon Unggul Sementara di Pilkada Kuningan. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/513525/momon-unggul-sementara-di-pilkada-kuningan/full&view=ok>.
- Tribunnews.com. 2013. "Istri Bupati Kuningan Gantikan Jabatan Suaminya". 3 Desember. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/12/03/istri-bupati-kuningan-gantikan-jabatan-suaminya>
- Wasisto, R. D. (2013). *Revivalisme Kekuatan Familisme : Dinasti Politik di Aras Lokal*. Sosiologi Masyarakat.